

BAB II

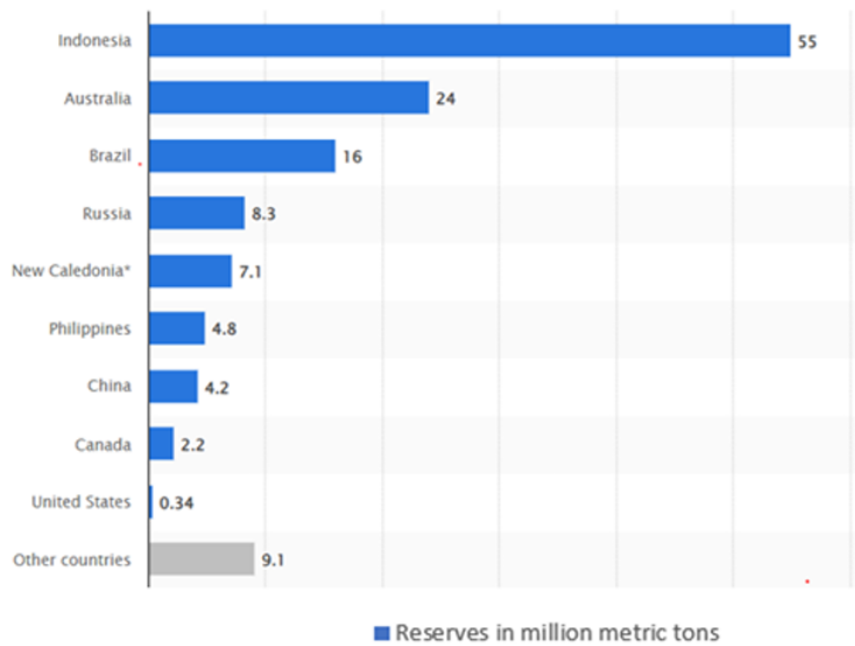
INDUSTRI NIKEL DAN KEMUNCULAN GERAKAN “SAVE SAGEA” DI HALMAHERA TENGAH

Pembahasan dalam bab ini membahas mengenai dinamika industri nikel dalam rangka transisi energi global dan masyarakat di sekitar kawasan industri dengan berfokus pada salah satu wilayah Indonesia yaitu Maluku Utara, tepatnya di Halmahera Tengah. Bab ini membantu memberikan gambaran umum secara jelas melalui konteks-konteks yang berkaitan dengan subjek utama penelitian ini yaitu masyarakat Desa Sagea sebelum dibahas lebih mendetail pada bab selanjutnya. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari tiga bagian yang dijelaskan secara runtut: perkembangan industri nikel di Indonesia kemudian dilanjutkan pada pembahasan mengenai kehadiran proyek industri nikel di Halmahera Tengah yang digunakan sebagai awalan untuk memperkenalkan konteks yang melatarbelakangi gerakan sebelum akhirnya masuk pada pembahasan kemunculan gerakan “Save Sagea” sebagai bagian dari dinamika isu industri pengolahan nikel dan transisi energi global. Melalui tiga bagian tersebut, bab ini menjelaskan bagaimana dinamika yang terjadi dalam konteks lokal atas kemunculan proyek industri pengolahan hasil tambang yang diinisiasi oleh pemerintah bersama dengan pihak internasional. Bab ini digunakan sebagai dasar untuk memahami mengapa gerakan “Save Sagea” melakukan perlawanan terhadap PT IWIP yang membawa narasi transisi energi global sejak 2018-2023.

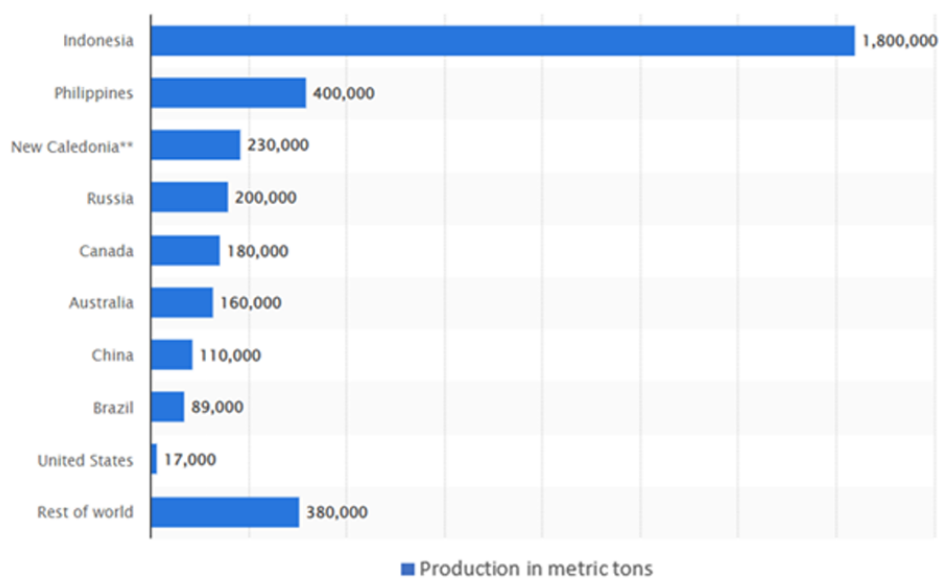
2.1. Perkembangan Industri Nikel di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, nikel menjadi salah satu komoditas strategis yang semakin signifikan dalam rantai pasok global. Indonesia memainkan peran penting dalam hal ini karena menjadi negara yang menempati urutan pertama dalam jumlah cadangan nikel dan produksi pertambangan nikel di dunia (U.S. Geological Survey, 2024).

United States Geological Survey (USGS) mencatat bahwa cadangan nikel Indonesia yaitu sebesar 55 juta ton. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia dengan diikuti oleh Australia sebesar 24 juta ton, Brazil 16 juta ton, Rusia 8,3 juta ton, Kaledonia Baru 7,1 juta ton, Filipina 4,8 juta ton, Tiongkok 4,2 juta ton, Kanada 2,2 juta ton, Amerika Serikat 0,34, dan negara-negara lain yang jika dijumlahkan sebesar 9,1 juta ton. Selain data cadangan nikel tersebut, Indonesia juga diketahui memiliki jumlah produksi tambang nikel sebesar 1,8 juta ton pada 2023. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan produksi tambang nikel tertinggi di dunia diikuti oleh Filipina sebesar 400 ribu ton, Kaledonia Baru 230 ribu ton, Rusia 200 ribu ton, Kanada 180 ribu ton, Australia 160 ribu ton, Tiongkok 110 ribu ton, Brazil 89 ribu ton, Amerika Serikat 17 ribu ton, dan negara-negara lain di dunia yang jika ditotal sebesar 380 ribu ton. Dengan posisi Indonesia yang menempati urutan pertama sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar dan negara dengan produksi tambang nikel tertinggi tersebut, Indonesia diketahui menguasai lebih dari 50% cadangan nikel global (Hati et al., 2024).



Gambar 2.1. Negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia
(Sumber: United States Geological Survey, 2024)



Gambar 2.2. Negara dengan produksi tambang nikel tertinggi di dunia
(Sumber: United States Geological Survey, 2024)

Tingginya nilai cadangan dan produksi tambang nikel ini meningkatkan permintaan nikel global yang bersumber dari Indonesia. Namun, dengan melimpahnya komoditas nikel, Indonesia belum mampu mengoptimalkannya untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena Indonesia masih banyak melakukan kegiatan ekspor nikel mentah yang dapat menghilangkan peluang keuntungan maksimal bagi Indonesia. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor nikel mentah pada 2020. Tindakan ini bertujuan untuk mendorong kebijakan hilirisasi, atau kebijakan yang mengatur pengolahan hasil tambang nikel menjadi produk setengah jadi (Barizi & Triarda, 2023). Melalui kebijakan ini, Indonesia berpotensi memperoleh nilai tambah yang lebih besar karena nikel tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan telah melalui proses pengolahan menjadi produk setengah jadi.

Kebijakan hilirisasi ini diterapkan dengan dilatarbelakangi oleh adanya tren peningkatan permintaan global nikel untuk bahan baku kendaraan listrik sebagai agenda transisi energi global. Menurut International Energy Agency, permintaan global untuk nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik diproyeksikan meningkat lebih dari 60% pada tahun 2040 (Ramadhani & Paksi, 2025). Banyak negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat mengincar nikel untuk mengembangkan produksi kendaraan listrik sebagai komitmennya terhadap transisi energi global (Dilshara et al., 2024). Dengan menerapkan kebijakan hilirisasi, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan global karena peningkatan peran yang dimiliki dari sekadar pemasok bahan baku

menjadi bagian dari rantai produksi bernilai tinggi (Ramadhani & Paksi, 2025). Hal ini pada gilirannya akan memberi peluang ekonomi yang besar, sekaligus memosisikan Indonesia sebagai pemegang peran penting dalam upaya transisi energi global (Pasaribu et al., 2025).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia mendorong untuk membangun dan mengoperasikan kawasan industri pengolahan hasil tambang nikel di beberapa provinsi yang memiliki cadangan nikel dalam jumlah yang besar. Beberapa provinsi tersebut antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat (Anbiyak & Cahyaningrum, 2021). Dengan berfokus pada wilayah-wilayah tersebut, pemerintah terus mendorong berkembangnya aktivitas pengolahan nikel sebagai upaya menjalankan kebijakan hilirisasi. Namun, terdapat tantangan signifikan dalam menerapkan upaya ini, yaitu mengenai keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Untuk melaksanakan upaya ini, dibutuhkan smelter (fasilitas pemurnian dan pengolahan), yang hal ini menjadi hambatan bagi Indonesia untuk membangun industri pengolahan nikel yang memadai karena keterbatasan teknologi tersebut (Rosada et al., 2023).

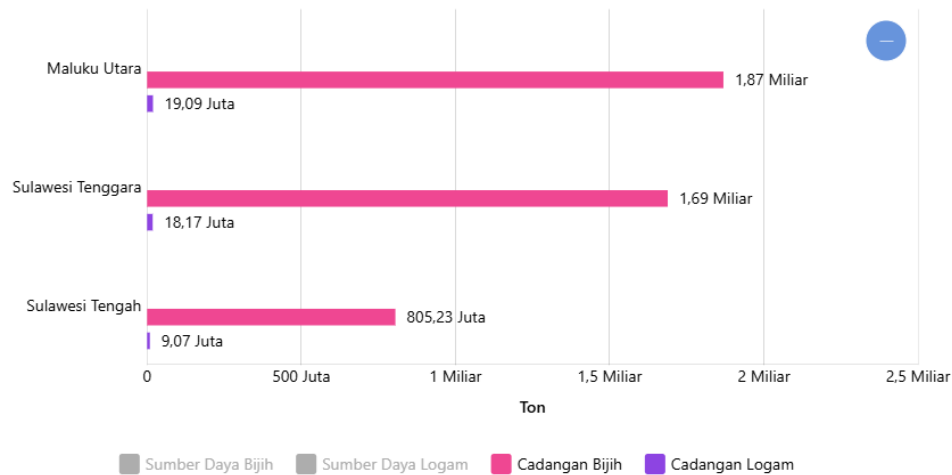
Tantangan tersebut pada gilirannya membuka peluang masuknya investasi asing langsung, karena melalui kehadiran industri-industri pengolahan tambang nikel di Indonesia, mendorong perusahaan global untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan fasilitas pengolahan nikel di dalam negeri. Peluang tersebut dapat terlihat secara nyata dengan Indonesia yang membuka kesempatan investasi asing dan kerja sama dengan Tiongkok. Langkah ini dilatarbelakangi oleh Tiongkok yang dikenal memimpin industri kendaraan listrik di dunia melalui

dominasi pada rantai pasokan secara keseluruhan mulai dari penambangan dan pemurnian bahan baku tambang hingga produksi kendaraan listrik. Kerja sama antara Tiongkok yang berpengalaman dalam industri ini serta Indonesia yang memiliki cadangan nikel yang melimpah dapat mendatangkan keuntungan untuk kedua belah pihak. Bagi Indonesia, kerja sama tersebut membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas pengolahan nikel di dalam negeri serta mempercepat pengembangan industri pengolahan hasil pertambangan. Sementara itu, bagi Tiongkok, kerja sama ini memberikan akses yang lebih stabil terhadap pasokan bahan baku nikel yang penting bagi keberlanjutan industri manufaktur, khususnya dalam sektor baterai kendaraan listrik. Hubungan yang saling melengkapi ini kemudian mendorong peningkatan investasi dan pengembangan industri nikel di Indonesia, terutama setelah pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral melalui pengolahan di dalam negeri (Barizi & Triarda, 2023).

2.2. Kehadiran Proyek Industri Nikel di Halmahera

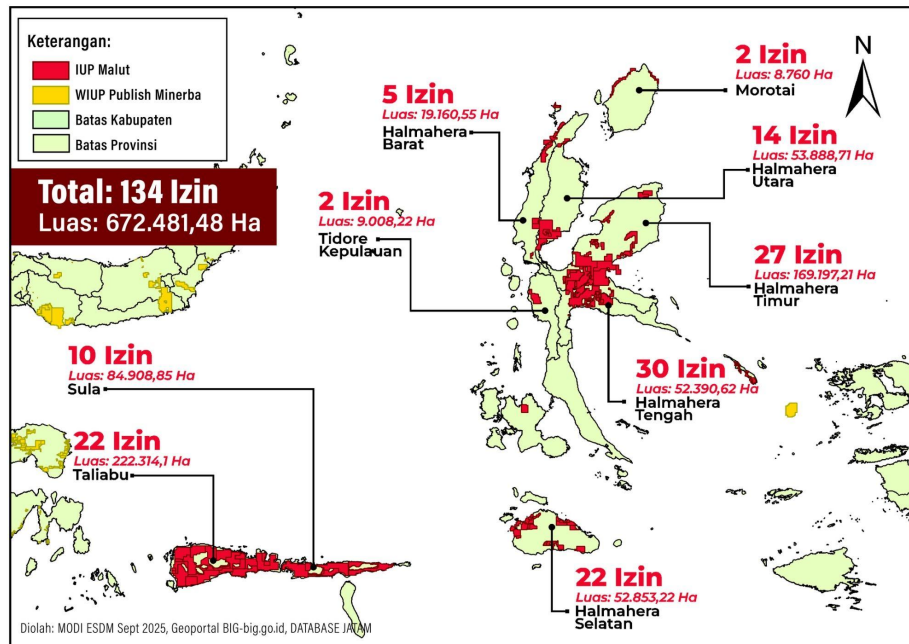
Proyek kerjasama dengan Tiongkok untuk menerapkan kebijakan hilirisasi nikel ini diaplikasikan dalam beberapa kawasan industri pengolahan nikel di Indonesia yang memiliki sumber daya dan cadangan nikel dalam jumlah besar di Indonesia seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Di antara kawasan tersebut, Maluku Utara menjadi kawasan yang menunjukkan perkembangan aktivitas pengolahan nikel yang signifikan dalam

beberapa tahun terakhir. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Maluku Utara memiliki cadangan nikel dan bijih nikel terbesar di Indonesia dengan total sebesar 1,87 miliar ton (Syaharani, 2024).



Gambar 2.3. Volume Sumber Daya dan Cadangan Bijih Nikel Berdasarkan 3 Provinsi Tertinggi
(Sumber: Kementerian ESDM, 2024)

Besarnya jumlah cadangan nikel tersebut menjadikan Maluku Utara sebagai fokus pengembangan kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Salah satu wilayah di Maluku Utara dengan pengembangan kawasan industri pengolahan nikel yang signifikan adalah Halmahera Tengah. Halmahera Tengah memiliki wilayah strategis karena memiliki cadangan nikel yang signifikan serta lokasi yang mendukung pengembangan kawasan industri terpadu. Hal ini dapat tercermin melalui data perizinan yang menunjukkan bahwa Halmahera Tengah memiliki total Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbanyak di antara wilayah lain yang berada di Maluku Utara (Wicaksono, 2023).



Gambar 2.4. Sebaran Izin Pertambangan Nikel di Maluku Utara
(Sumber: JATAM, 2025)

Di antara izin-izin pertambangan yang terdaftar di Halmahera Tengah, salah satu proyek utama dalam pengembangan industri nikel di wilayah ini yang paling masif operasinya adalah PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). PT IWIP merupakan perusahaan pengolahan nikel hasil patungan dari 4 perusahaan Tiongkok (Tsingshan, Huayou, CATL, dan Zhenshi) yang beroperasi di Indonesia, tepatnya di Halmahera Tengah, Maluku Utara (Drakel, 2023). Pengembangan kawasan industri ini dilatarbelakangi oleh perumusan strategi transformasi industri yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam kerangka kebijakan ini, sektor nikel ditempatkan sebagai salah satu prioritas pengembangan industri nasional, termasuk melalui pembangunan kawasan industri yang berfokus

pada pengolahan dan pemurnian nikel. Dalam konteks tersebut, PT IWIP diproyeksikan berperan penting dalam pengembangan industri pertambangan dan pengolahan nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik (Sangaji et al., 2024).



Gambar 2.5. Lokasi kawasan industri PT IWIP
(Sumber: IWIP, 2018)

Kawasan industri yang didirikan sejak Agustus 2018 ini secara legal mendapatkan izin dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia dengan ditetapkan sebagai Proyek Prioritas Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam dokumen tersebut, proyek prioritas strategis diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional melalui penguatan industrialisasi berbasis sumber daya alam, peningkatan nilai tambah komoditas, serta perluasan investasi di sektor industri. Penetapan IWIP dalam kerangka kebijakan ini menunjukkan bahwa pengembangan kawasan industri pengolahan nikel di Halmahera Tengah diposisikan sebagai bagian dari agenda strategis

pemerintah dalam mendukung hilirisasi mineral dan penguatan daya saing industri nasional (Sangaji et al., 2024).

Selain sebagai Proyek Prioritas Negara, IWIP juga dikategorikan sebagai Objek Vital Nasional yang merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Dalam regulasi tersebut, Objek Vital Nasional didefinisikan sebagai kawasan, instalasi, atau usaha yang memiliki peran penting bagi kepentingan negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga keberadaannya memerlukan pengamanan khusus. Penetapan status ini menunjukkan bahwa kawasan industri IWIP dipandang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung pengembangan industri pengolahan mineral dan agenda hilirisasi sumber daya alam di Indonesia sehingga memerlukan keamanan khusus agar keberjalanannya tidak terhambat dan dapat meningkatkan perekonomian nasional (Sangaji et al., 2024).

Melengkapi statusnya sebagai Proyek Prioritas Nasional dan Objek Vital Nasional, Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo, secara resmi menetapkan IWIP sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Melalui kebijakan tersebut, proyek-proyek yang termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional memperoleh prioritas dalam proses perizinan, dukungan kebijakan, serta koordinasi antar lembaga pemerintah guna mempercepat pelaksanaannya. Hal ini membuat PT IWIP memiliki landasan yang kuat untuk

mempercepat operasionalnya sebagai penggerak utama hilirisasi industri mineral yang menjadi salah satu fokus ekonomi nasional (Sangaji et al., 2024).

Dikutip dari situs resmi IWIP, kawasan industri ini adalah kawasan industri terpadu pertama di Indonesia yang mengintegrasikan kegiatan pengolahan dan produksi turunan nikel khususnya komponen baterai kendaraan listrik, yang menjadi fokus PT IWIP, dalam satu wilayah. Aktivitas di dalamnya meliputi pengoperasian smelter, produksi nickel pig iron (NPI), ferronickel, serta produk turunan lain yang digunakan dalam industri baja dan bahan baku baterai hingga menjadi produk akhir setengah jadi yang bernilai lebih tinggi. Hasil produksi ini kemudian diekspor sebagian besar ke Tiongkok sebagai negara investor dan negara-negara pasar ekspor utama seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Utara, dan Eropa (A. Fiqri, personal communication, March 6, 2026; Ramadhani & Paksi, 2025).

Dengan aktivitasnya yang mendukung hilirisasi, IWIP memainkan peran dalam pertumbuhan ekonomi baru nasional. Hal ini ditunjukkan melalui laju pertumbuhan ekonomi di IWIP yang mencapai sekitar 20% per tahun, yang bahkan angkanya jauh melampaui rata-rata nasional (Handayani, 2026). Pada tahun 2023, perusahaan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi nikel dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan memproduksi 1,72 juta ton nikel dan menghasilkan pendapatan sekitar 688 juta USD, dengan 30% diantaranya berdampak langsung pada perekonomian lokal hingga nasional (Muflih et al., 2025). Selain itu, IWIP juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara sebagai sektor unggulan yang sedang berkembang pesat, dibuktikan

dengan Maluku Utara yang menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia selama beberapa tahun sejak 2021 (Mae, 2026; (Silfia, 2024). Tidak hanya nasional dan provinsi, IWIP juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian lokal, melalui kesempatan pekerjaan di kawasan industri. Selain itu, keberadaan IWIP juga membuka peluang usaha masyarakat di sekitar kawasan industri yang saat ini, sekitar 70% penduduk telah membuka usaha lokal mereka sendiri, seperti bisnis penyewaan dengan mengubah lahan mereka menjadi wisma atau hostel (A. Fiqri, personal communication, March 6, 2026; (Marsaoli, 2024).

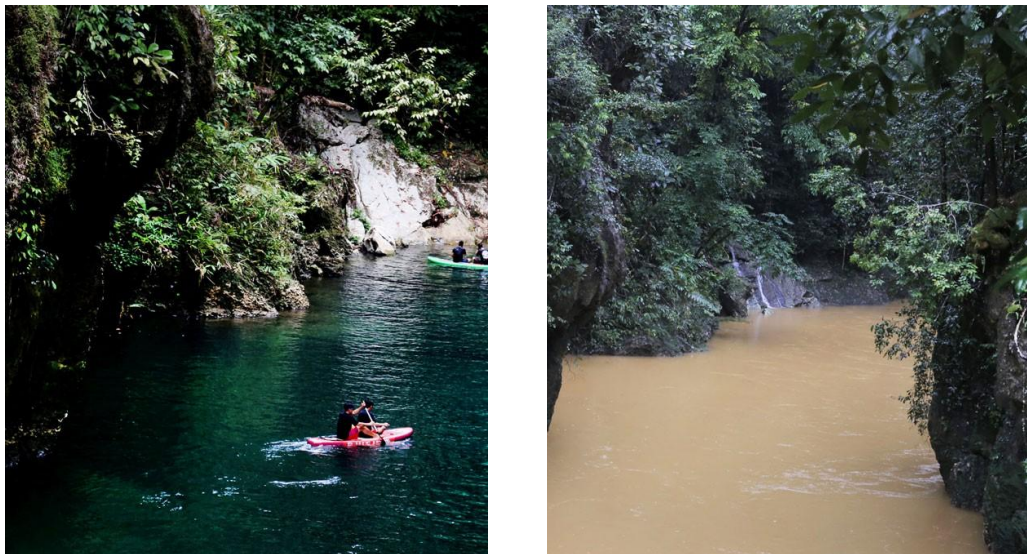
Adanya kawasan industri ini, selain menunjukkan langkah Indonesia-Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi lokal hingga nasional, juga menunjukkan upaya mereka untuk mendukung transisi energi global (Rosada et al., 2023). Keberadaan IWIP terhubung dengan dinamika pasar global, khususnya dalam rantai pasok kendaraan listrik dan teknologi energi bersih. Nikel menjadi salah satu mineral kunci dalam pengembangan baterai lithium-ion yang digunakan pada kendaraan listrik. Permintaan global terhadap nikel diproyeksikan terus meningkat dalam dekade ini seiring dengan percepatan transisi menuju sistem energi rendah karbon (Hati et al., 2024). Kawasan industri seperti IWIP berperan dalam menyediakan produk turunan nikel yang kemudian masuk ke jaringan produksi global. Pemetaan rantai pasok menunjukkan adanya keterkaitan antara kawasan industri nikel di Indonesia dengan sektor otomotif dan energi terbarukan di berbagai negara (Geurts et al., 2025).

2.3. Kemunculan Gerakan “Save Sagea”

Kehadiran PT IWIP sebagai industri pertambangan dan pengolahan nikel di Halmahera dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya membawa perubahan dalam sektor ekonomi lokal hingga nasional tetapi juga dianggap memunculkan perubahan terkait lingkungan di sekitar lokasi operasional. Deforestasi adalah salah satu perubahan lingkungan yang terjadi sejak adanya pertambangan nikel oleh PT IWIP. Berdasarkan data dari Forest Watch Indonesia (FWI), luas penggundulan hutan yang dilakukan untuk aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel di Halmahera Tengah adalah sebesar 3.714 hektar (Forest Watch Indonesia, 2025). Penggundulan hutan atau deforestasi yang terjadi mengakibatkan hilangnya gas rumah kaca (CO₂e) yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk karbon pada hutan-hutan tersebut. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan ancaman pemanasan global. Selain itu, deforestasi juga mengancam keanekaragaman hayati yang berhabitat di dalam kawasan hutan di Halmahera Tengah yang dikenal memiliki keunikan dan kekayaan biodiversitas yang tinggi karena berada di kawasan Wallacea (A. Fiqri, personal communication, March 6, 2026).

Perubahan yang lain di Halmahera Tengah juga dapat terlihat tepatnya di Goa Boki Maruru dan kawasan Daerah Aliran Sungai Sagea yang diduga mengalami pencemaran sejak adanya pertambangan gamping di hulu sungai dalam proses produksi pengolahan nikel. Pencemaran mulai masif terjadi sejak tahun 2023 yang ditandai oleh Sungai Sagea dan Goa Boki Maruru kerap terlihat keruh kecoklatan (Pardede, 2026). Hal ini didukung oleh pengujian yang dilakukan oleh Nexus3 Foundation dan Universitas Tadulako pada sampel air Sungai Sagea

dengan mengacu pada standar Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau US Environmental Protection Agency (USEPA). Berdasarkan hasil pengujian tersebut ditemukan bahwa kadar logam berat seperti kromium dan nikel terkandung dalam sampel air Sungai Sagea dan jumlahnya melebihi standar USEPA (Nurgianto, 2025).



Gambar 2.6. Perbedaan kondisi kawasan Goa Boki Maruru sebelum dan sesudah tercemar

(Sumber: Tempo, 2023)

Perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi akibat adanya aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Perubahan pada hutan akibat deforestasi yang dilakukan di Halmahera Tengah melepaskan karbon yang memicu penurunan kualitas udara. Penurunan kualitas udara oleh deforestasi yang diperparah dengan aktivitas pengolahan nikel yang menimbulkan polusi dapat memicu risiko penyakit pernapasan pada

masyarakat seperti ISPA (Transparency International Indonesia, 2024). Adapun perubahan lingkungan pada wilayah perairan seperti Sungai Sagea dan Goa Boki Maruru mengakibatkan hilangnya sumber air bersih karena sumber air keduanya dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan harian maupun pertanian. Selain itu, perubahan ini dapat berdampak pada ekosistem sungai karena Sungai Sagea yang dimanfaatkan masyarakat sebagai budidaya ikan tawar. Tercemarnya biota ikan Sungai Sagea oleh logam berat yang berlangsung terus-menerus sampai kepada manusia yang mengkonsumsinya dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan jika terakumulasi dalam jangka panjang. Akumulasi logam berat yang pada dasarnya bersifat radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh ini dapat memicu kerusakan sel hingga memicu risiko kanker. Selain itu, risiko-risiko penyakit lain juga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat seperti penyakit kardiovaskular, gangguan neurologis, dan gangguan kekebalan tubuh (Maharani et al., 2025).

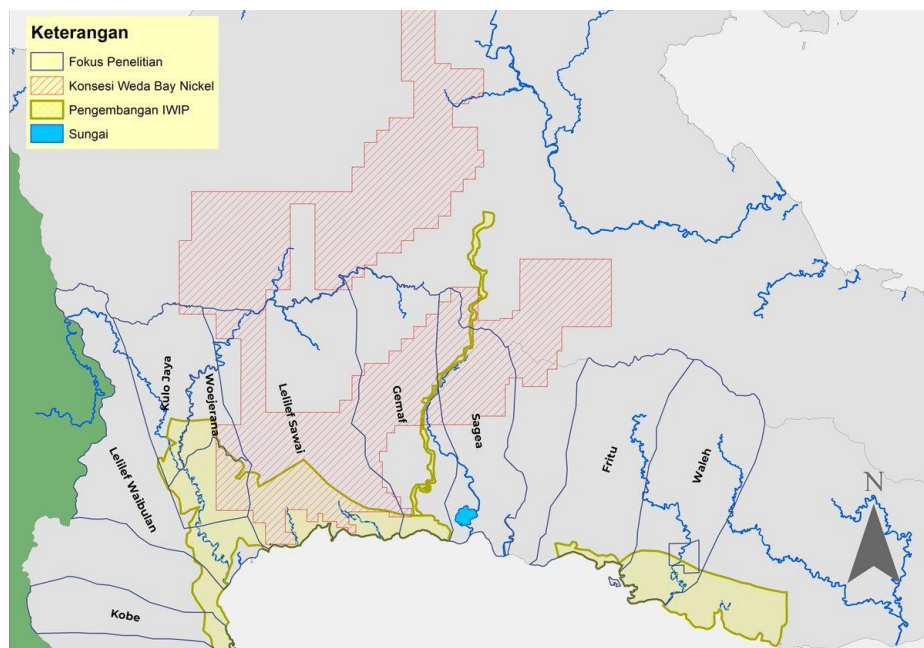
Adanya perubahan-perubahan lingkungan beserta risiko-risiko ancaman yang dapat dialami masyarakat tersebut pada akhirnya memunculkan dinamika sosial baru di tingkat masyarakat lokal. Seiring dengan masifnya aktivitas industri yang dilakukan di wilayah tersebut, masyarakat setempat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan industri mulai menunjukkan berbagai bentuk respons atas perubahan yang mereka alami sejak beroperasinya PT IWIP (Marsaoly et al., 2024; Izzah & Seber, 2023). Hal ini dapat secara nyata terlihat pada munculnya sebuah gerakan akar rumput yang dikenal dengan nama “Save Sagea”.

Gerakan “Save Sagea” merupakan sebuah wadah kolektif bagi masyarakat Desa Sagea untuk menyuarakan aspirasi terkait berbagai dinamika yang terjadi

yang mempengaruhi kondisi wilayah tempat tinggal mereka. Dalam sejumlah pemberitaan media berita, laporan-laporan Non-Governmental Organization, maupun dari pernyataan narasumber penelitian ini, “Save Sagea” digambarkan sebagai gerakan yang melibatkan warga desa, dilatarbelakangi oleh para pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam suatu paguyuban yang disebut Ikatan Pelajar/Mahasiswa Sagea. Kelompok ini menjadi cikal bakal terbentuknya gerakan “Save Sagea” atas perhatiannya terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal mereka yang mengalami perubahan sejak adanya aktivitas pertambangan. Aktivitas yang mereka lakukan secara kolektif berupa kampanye-kampanye lingkungan kepada masyarakat sekitar yang kemudian didukung oleh masyarakat dan semakin berkembang hingga pada 2018, gerakan “Save Sagea” mulai digunakan hingga sekarang sebagai identitas bersama yang merepresentasikan kepedulian dan perhatian masyarakat Desa Sagea terhadap masa depan desa serta ruang hidup mereka.

Gerakan ini terdiri dari berbagai kalangan mulai dari pemuda hingga orang tua dengan berbagai latar belakang seperti nelayan, ibu rumah tangga, hingga mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan wilayah Sagea (A. Fiqri, personal communication, March 6, 2026). Mereka bergerak secara kolektif dengan beberapa perwakilan dari masyarakat yang memahami kondisi dan dinamika lingkungan sekitar bertindak sebagai dinamisator dan juga juru bicara untuk setiap aktivitas kampanye publik yang mereka lakukan (A. Fiqri, personal communication, March 6, 2026).

Desa Sagea, yang menjadi asal gerakan tersebut terbentuk dan bergerak, merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Wilayah ini secara geografis terletak di sekitar kawasan industri pengolahan nikel yang berkembang di sekitar konsesi aktivitas pertambangan dan pengolahan PT IWIP. Beberapa desa di kawasan tersebut, termasuk Sagea, memiliki keterkaitan sosial dan ekonomi yang kuat dengan lingkungan pesisir dan sumber daya alam di sekitarnya. Dalam sejumlah penelitian mengenai wilayah Halmahera Tengah, desa-desa di sekitar kawasan industri nikel tersebut digambarkan sebagai komunitas yang mengalami perubahan sosial seiring dengan berkembangnya aktivitas industri dan meningkatnya mobilitas penduduk (Muflih et al., 2025).



Gambar 2.7 Peta Wilayah Desa Sagea dan Area Konsesi Tambang di Halmahera Tengah
(Sumber: JATAM, 2024)

Dalam perkembangannya, “Save Sagea” mulai semakin terlihat pada 2023, saat mereka menyuarkan pengalamannya atas aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel oleh PT IWIP. Eksistensinya ditandai melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik di tingkat lokal maupun di ruang publik yang lebih luas. Gerakan ini tidak hanya muncul dalam bentuk aktivitas di tingkat desa, tetapi juga melalui berbagai bentuk komunikasi publik, seperti pernyataan sikap, kegiatan diskusi komunitas, serta penyebaran informasi melalui media sosial. Melalui berbagai kanal tersebut, “Save Sagea” menjadi salah satu bentuk kolektif masyarakat lokal yang aktif dalam menyampaikan pandangan mereka terkait dinamika pembangunan industri pertambangan dan pengolahan nikel di wilayah Halmahera Tengah (A. Fiqri, personal communication, March 6, 2026; Bidul & Widowaty, 2024).

Dalam praktiknya, sebagai bagian dari aktivitasnya, gerakan “Save Sagea” melakukan berbagai bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan pesan gerakan kepada masyarakat yang lebih luas. Salah satu contohnya adalah melalui penyebaran materi visual berupa poster kampanye yang memuat tagar #SaveSagea serta berbagai pesan yang berkaitan dengan wilayah Sagea. Materi kampanye tersebut digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi masyarakat mengenai perkembangan wilayah mereka (A. Fiqri, personal communication, March 6, 2026; Save Sagea, 2026). Selain kampanye visual, “Save Sagea” juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah program Sekolah Relawan Kampung, yaitu kegiatan yang mempertemukan masyarakat dan relawan dalam

sebuah ruang belajar bersama. Dalam kegiatan tersebut, peserta berdiskusi mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di wilayah Sagea serta perkembangan sosial yang terjadi di wilayah Halmahera Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai peserta, termasuk pemuda dan masyarakat lokal, yang terlibat dalam diskusi serta pertukaran pengalaman mengenai kondisi wilayah mereka yang berada di sekitar kawasan industri nikel di Teluk Weda (Save Sagea, 2025).



Gambar 2.8 Contoh bentuk poster kampanye Gerakan “Save Sagea”
(Sumber: Akun Instagram “Save Sagea” (@savesagea), 2025)



Gambar 2.9 Contoh aktivitas diskusi publik “Save Sagea”
(Sumber: Akun Instagram “Save Sagea” (@savesagea), 2025)

Dalam upayanya untuk menyuarakan aspirasinya atas aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel oleh PT IWIP, “Save Sagea” muncul sebagai bagian dari dinamika masyarakat sipil yang lebih luas di Maluku Utara. Dalam beberapa kesempatan, gerakan ini terlihat berinteraksi dengan jaringan organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi lingkungan, serta komunitas lokal lainnya yang memiliki perhatian terhadap isu-isu pembangunan di wilayah tersebut. Kehadiran jaringan ini menunjukkan bahwa gerakan masyarakat di tingkat lokal tidak berdiri secara terpisah, melainkan seringkali terhubung dengan berbagai aktor masyarakat sipil yang memiliki kepedulian serupa terhadap isu-isu sosial dan lingkungan di kawasan pertambangan (Wicaksono, 2023).

Berbagai bentuk aktivitas perlawanan beserta jejaring solidaritas yang dibangun oleh “Save Sagea” dalam beberapa tahun ke belakang secara konsisten dan berkelanjutan menandakan adanya kemungkinan persoalan yang jauh lebih

besar dan kompleks daripada sekadar isu lingkungan domestik. Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh mengapa gerakan “Save Sagea” dapat terbentuk dan mengerahkan kekuatan kolektifnya secara meluas, fenomena ini tidak dapat lagi dilihat hanya dari permukaan kronologisnya. Diperlukan sebuah analisis yang lebih mendalam untuk membongkar faktor-faktor struktural dari berbagai sisi hingga dinamika tata kelola kekuasaan dalam isu yang melatarbelakangi kemunculan gerakan ini. Hal ini akan dianalisis secara komprehensif pada bab selanjutnya.